



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan rancangan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan Program Pembentukan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Gabungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Hasil Rapat Dengar Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 11 November 2020;
 3. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 180/221/HUK, tertanggal 17 November 2021, perihal Penyampaian Daftar Proprmperta Kota Balikpapan Tahun 2021;

4. Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor
..... dan Nomor
..... tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan DPRD Kota Balikpapan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun 2021 sebanyak 18 (Delapan Belas) Rancangan Peraturan Daerah, dengan daftar nama rancangan peraturan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Propemperda Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
1. 7 (Tujuh) Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; dan
 2. 11 (Sebelas) Raperda usulan Pemerintah Kota Balikpapan.
- KETIGA** : Dalam Propemperda 2021 Kota Balikpapan dapat dimuat Daftar Kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 2. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 4. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu, DPRD Kota Balikpapan atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan

d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

KETUA,



ABDULLOH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

NO.	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INSISIATOR	STATUS			PERANGKAT DAERAH
				BARU	PENYEMPURNAAN	PELAKSANAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum	Ketertiban Umum	DPRD		√	UU nomor 23 tahun 2014	SATPOL PP
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	DPRD		√	UU nomor 18 tahun 2008	DLH
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	DPRD		√	UU nomor 26 tahun 2007	DPPR, DPMP
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRD	√		UU nomor 32 tahun 2009	DLH
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Pedagang Kaki Lima	DPRD	√		UU nomor 20 Tahun 2008	DISDAG, DKUMKMP
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Puduk Halal	Jaminan Puduk Halal	DPRD	√		UU nomor 33 tahun 2014	DISDAG, DKUMKMP, SATPOL PP
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	DPRD		√	UU nomor 14 tahun 2002	BPPDRD

8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan	Penyelenggaraan Kepemudaan	PEMERINTAH KOTA	√		UU nomor 40 tahun 2019	DPOP
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi	Transportasi	PEMERINTAH KOTA	√		UU nomor 22 tahun 2009	Dinas Perhubungan
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan	PEMERINTAH KOTA	√		PP nomor 17 tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan	Rencana Pengembangan Industri di Kota Balikpapan	PEMERINTAH KOTA	√		UU nomor 3 tahun 2014	DKUMKMP
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan	Tata Ruang	PEMERINTAH KOTA	√		UU nomor 25 tahun 2007	dDinas Pertanahan dan Penataan Ruang
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Tata Ruang Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU nomor 25 tahun 2007	dDinas Pertanahan dan Penataan Ruang
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kearsipan	PEMERINTAH KOTA	√		UU nomor 43 tahun 2009	Dinas Perpustakaan dan Arsip
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU nomor 23 tahun 2002	BPPDRD
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024	Rencana Pembangunan	PEMERINTAH KOTA	√		Pemendagri nomor 86 tahun 2017	Bappeda Litbang
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Retribusi Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	UU nomor 28 tahun 2009	BPPDRD
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMERINTAH KOTA		√	PP nomor 12 tahun 2019	BPKD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KETUA,



ABDULLOH